

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandangan keliru mengenai pendidikan sejarah di sekolah-sekolah saat ini, merupakan suatu kenyataan yang membuat posisi pelajaran sejarah di sekolah kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak. Menurut Hasan (2012: 127-128) ada beberapa anggapan keliru yang berkembang dalam masyarakat, guru, maupun peserta didik mengenai pendidikan sejarah. Kekeliruan tersebut adalah; pertama, materi pelajaran sejarah adalah materi yang mudah dipelajari; kedua, pelajaran sejarah hanya berkenaan dengan kehidupan manusia di masa lampau, karena itu mempelajari sejarah sama dengan mempelajari sesuatu yang sudah usang, lapuk, dan tidak berkaitan dengan kehidupan sekarang dan masa yang akan datang peserta didik; ketiga, mata pelajaran sejarah hanya untuk mengembangkan kemampuan mengingat (kognitif tingkat pertama), mereka hanya belajar mengingat nama tokoh, peristiwa, dan angka tahun.

Kekeliruan tersebut sebenarnya disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat, guru, maupun peserta didik mengenai hakikat pendidikan sejarah itu sendiri. Selanjutnya Hasan menjelaskan bahwa sebenarnya objek pelajaran sejarah terpisah jauh dari masa sekarang dan perbedaan waktu yang jauh itu menimbulkan kesulitan tertentu. Memahami apa yang terjadi di masa lalu dalam konteks kehidupan yang berbeda dari masa sekarang jauh lebih sulit. Terhadap kekeliruan yang kedua Hasan menjelaskan bahwa :

Ateng Rasihudin, 2012

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Isu Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peristiwa Rawagede

: Penelitian Tindakan Kelas pada Kelas XI IPS-5 di SMA Negeri 2 Karawang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

apa yang sedang dialami masa sekarang adalah kelanjutan dan penyesuaian dari apa yang terjadi di masa lalu. Perbedaan antara masa lampau dengan masa sekarang menghendaki adanya perubahan dan penyesuaian. Oleh karena itu untuk memahami masa sekarang harus pula memahami masa lalu. Artinya, peserta didik harus berpikir dalam dimensi waktu yang berbeda. Ini adalah suatu tantangan intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan harus berpikir dalam satu dimensi waktu atau bahkan tanpa menjadikan dimensi waktu sebagai faktor yang berpengaruh terhadap objek yang dipelajari.

Kekeliruan yang ketiga menunjukkan bahwa pelajaran sejarah hanya memberikan sumbangan pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat rendah yaitu kemampuan mengingat saja, tidak mengembangkan kemampuan kognitif yang lebih tinggi seperti menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi, karena tidak berkaitan dengan kehidupan masa sekarang. Dalam hal ini Hasan menjelaskan :

Padahal belajar sejarah adalah belajar dari pengalaman masa lalu dan pengaruhnya pada masa sekarang dan masa mendatang. Bentuk pengaruhnya pada masa sekarang adalah pengaruh yang sedang dalam proses. Pengaruh pada masa yang akan datang sangat ditentukan oleh kemampuan menerapkan apa yang terjadi di masa lampau dalam kehidupan masa sekarang. Oleh karena itu adalah suatu keharusan bagi peserta didik untuk mengembangkan penyesuaian tertentu dari apa yang mereka pelajari dari masa lampau ke kehidupan masa kini dan dampaknya bagi masa datang.

Dengan demikian jelaslah bahwa sebenarnya pelajaran sejarah tidak hanya mengembangkan aspek kemampuan mengingat saja, tetapi juga aspek aplikasi, analisis, sintesis bahkan evaluasi.

Untuk menghadapi berbagai pandangan yang keliru tersebut, para guru sejarah ditantang untuk mampu merubah image dan berusaha melakukan pencitraan serta membuktikan kepada semua pihak bahwa pelajaran sejarah

Ateng Rasihudin, 2012

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Isu Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peristiwa Rawagede

: Penelitian Tindakan Kelas pada Kelas XI IPS-5 di SMA Negeri 2 Karawang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

merupakan pelajaran yang sangat penting bagi para peserta didik dalam mengembangkan berbagai kemampuan kognitifnya dan bahkan dalam pembentukan karakter yang baik sebagai warga negara. Hal itu dapat diwujudkan dengan kerja keras guru-guru sejarah di sekolah.

Realita yang ada saat ini adalah proses pembelajaran sejarah yang dilaksanakan guru pada umumnya bersifat konvensional dengan mengandalkan ceramah dan tanya jawab sebagai metode pembelajaran yang utama. Bagi suatu tradisi yang telah mendarah daging, guru sejarah seolah tak memiliki kemampuan untuk berubah dan berinovasi menyelenggarakan proses pembelajaran sejarah yang lebih berdampak positif bagi para siswa dalam pengembangan kemampuan berpikir kritisnya, partisipasi, dan emansipasinya dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran masih didominasi peran guru yang sentralistik dan siswa hanya sebagai objek yang harus menerima informasi dan menjalankan segala perintah guru. Hal ini juga terjadi pada umumnya di dunia pendidikan secara luas.

Paulo Freire seperti yang dikutip oleh Kneller (Supriatna, 2007: 4) menjelaskan :

... an act of depositing in which the students are the depositories and the teacher is the depositor. Instead of communicating, the teacher issues communiques and 'makes deposits' which the students patiently receive, memorize, and repeat. This is the 'banking' concepts of education, in which the scope of action allowed to the students extends only as far as receiving, filing, and storing the deposits...where knowledge is a gift bestowed by those who consider themselves knowledgeable upon those they consider to know nothing.

Menurut Freire, pada umumnya pendidikan yang berlangsung di sekolah seperti menggunakan sistem bank dimana siswa sebagai tempat penyimpanan dan guru sebagai penyimpan. Bahkan dalam komunikasi guru menjadi penyampai informasi dan memberikan setoran (simpanan) dan siswa sebagai penerima,

Ateng Rasihudin, 2012

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Isu Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peristiwa Rawagede

: Penelitian Tindakan Kelas pada Kelas XI IPS-5 di SMA Negeri 2 Karawang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

mengingatnya dan mengulang. Ini merupakan konsep bank dalam pendidikan. Di sini terlihat bagaimana guru sebagai pusat pembelajaran dan siswa sebagai pembelajar pasif dan hanya menerima informasi, mengingat, dan mengulang kembali informasi yang diberikan guru kepadanya.

Darmawan (dalam Mulyana: 2007) mengutip pendapat Parrington dalam bukunya *The Idea of an Historical Education* (1980) yang menyatakan bahwa pengajaran sejarah sangat didominasi oleh pengajaran hafalan dengan terlalu menekankan “*Chalk and Talk*” (kapur dan bicara) dan terlalu menekankan memorisasi dengan mengabaikan unsur pengembangan kemampuan intelektual yang lebih tinggi.

Seorang guru harus berupaya menciptakan proses pembelajaran yang mendorong keaktifan siswa terutama dalam menghadapkan siswa kepada masalah-masalah kontemporer yang ada di dalam masyarakat dan lingkungannya, agar para siswa terlatih dalam menganalisis masalah-masalah sosial disekitarnya dan mampu memecahkan berbagai masalah dengan mengoptimalkan kemampuan berpikirnya.

Menurut Jonasson, et al.(Supriatna, 2007: 13) ‘*Meaningful learning occurs when learners actively interpret their experience using internal, cognitive operations. Meaningful learning requires knowledge to be constructed by the learner, not transmitted from the teacher to the student*’, Oleh karena itu, pembelajaran sejarah akan “meaningful” apabila guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan para siswa berperan aktif dalam

Ateng Rasihudin, 2012

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Isu Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peristiwa Rawagede

: Penelitian Tindakan Kelas pada Kelas XI IPS-5 di SMA Negeri 2 Karawang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

menggunakan berbagai sumber belajar sejarah, konstruktif dalam menarik hubungan antara peristiwa masa lalu dengan masalah-masalah kontemporer, bersifat intentional dengan menggunakan pengalaman belajar masa lalu untuk memahami pengetahuan/pengalaman yang baru, aktif dalam mengembangkan pemahaman dan menganalisis masalah sosial kontemporer secara *cooperative* atau *collaborative*, serta mampu memaknai semua peristiwa sejarah yang ditariknya menjadi sesuatu yang otentik karena dapat dihubungkan dengan masalah-masalah sosial sehari-hari.

Berdasarkan pengalaman penulis selama bertugas di SMA Negeri 2 Karawang, proses pembelajaran sejarah biasanya dilaksanakan secara konvensional dan kurangnya partisipasi siswa dalam merespon pembelajaran, pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan siswa terhadap pelajaran dirasakan kurang. Hal ini dimungkinkan karena model pembelajaran dan metode pembelajaran yang ditampilkann guru kurang menarik dan merangsang siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, atau mungkin karena kemampuan siswa untuk menanggapi pembelajaran dan kebiasaan berpikir kritis siswa sangat kurang, ini terbukti dengan kurangnya pertanyaan atau tanggapan ketika guru memberi kesempatan bertanya atau menjawab pertanyaan ketika guru memberikan pertanyaan.

Permasalahan ini tentu saja tidak dapat dibiarkan, sebagai guru memiliki tanggung jawab profesi dalam mengembangkan kemampuannya untuk mengelola proses pembelajaran dengan baik dengan berbagai upaya inovasi pembelajaran. Di

Ateng Rasihudin, 2012

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Isu Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peristiwa Rawagede

: Penelitian Tindakan Kelas pada Kelas XI IPS-5 di SMA Negeri 2 Karawang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

sisi lain kemampuan siswa dalam berpikir kritis pun perlu dikembangkan. Guru sebagai pengembang kurikulum tentu memiliki akses yang sangat penting dalam menentukan tujuan pembelajaran dan mengangkat materi pembelajaran sejarah yang dapat mendorong kemampuan berpikir siswa dan mendorong minat siswa untuk belajar dengan partisipasi yang baik dalam proses pembelajaran. Sumber belajar yang paling dekat dengan siswa dan berbagai isu kontemporer perlu menjadi perhatian guru dalam mengangkat materi pembelajaran sejarah di kelas, agar proses pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik.

Kenyataan lain dalam pelaksanaan KTSP yang ada di lapangan menunjukkan pembelajaran tidak berpusat pada potensi peserta didik dan lingkungannya, kurang memperhatikan keragaman, kurang relevan dengan kebutuhan kehidupan, kurangnya keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dapat dikatakan bahwa prinsip pengembangan kurikulum tidak mendapat perhatian dari sebagian besar sekolah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku sekarang ini, sebenarnya memberikan peluang kepada para guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran.

Guru sebagai pengembang kurikulum di tingkat satuan pendidikan dapat mengoptimalkan keunggulan potensi yang dimiliki oleh sekolah, siswa dan lingkungannya sebagai unsur yang dapat dikembangkan dalam penyusunan silabus dan RPP. Namun banyak guru tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini, dan bahkan seolah tidak memahami kurikulum ini sehingga mereka tidak dapat berperan menyesuaikan diri dengan kurikulum yang berlaku. Bahkan yang ironis

Ateng Rasihudin, 2012

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Isu Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peristiwa Rawagede

: Penelitian Tindakan Kelas pada Kelas XI IPS-5 di SMA Negeri 2 Karawang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

adalah perubahan kurikulum dari waktu ke waktu tidak dapat merubah cara mereka menyajikan pembelajaran, kurikulum berganti tapi sikap, kemampuan, semangat, dan model pembelajaran yang ditampilkan masih tetap sama tak berubah. Seolah-olah terdapat *culture lag* antara perkembangan kurikulum dengan kemampuan guru dalam mengikutinya. Banyak guru menganggap perubahan kurikulum hanya merubah namanya saja dan tidak berimplikasi positif terhadap pengembangan pembelajaran yang dilakukannya.

Peluang yang diberikan oleh KTSP tersebut seyogyanya dapat memberikan dorongan kepada para guru sejarah untuk mengoptimalkan potensi daerah terutama untuk mengangkat peristiwa lokal menjadi bagian dari kurikulum pendidikan sejarah di sekolah. Sebagai guru di SMA yang berada di Karawang penulis melihat banyaknya peristiwa sejarah lokal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau materi pelajaran di Sekolah, misalnya tentang Peristiwa Rawagede yang terjadi pada tahun 1947 yang saat ini banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat luas. Pemberitaan mengenai keberhasilan tuntutan ganti rugi korban Peristiwa Rawagede diberbagai media baik cetak maupun elektronik akhir-akhir ini, menarik perhatian masyarakat tidak hanya di Indonesia tetapi bahkan dunia. Begitu luas pemberitaan itu menunjukkan begitu penting sejarah Peristiwa Rawagede dijadikan sebagai muatan lokal dalam kurikulum mata pelajaran sejarah di sekolah di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan pengalaman penulis, sejarah Peristiwa Rawagede belum dijadikan sebagai bagian dari pokok bahasan dalam kurikulum sejarah di sekolah

Ateng Rasihudin, 2012

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Isu Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peristiwa Rawagede

: Penelitian Tindakan Kelas pada Kelas XI IPS-5 di SMA Negeri 2 Karawang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

di wilayah Kabupaten Karawang, walaupun ada hanya dilaksanakan di sebagian kecil sekolah itu pun belum secara jelas dirumuskan dalam silabus mata pelajaran sejarah di SMA. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang belum merumuskan silabus dengan memasukan materi sejarah lokal khususnya Peristiwa Rawagede.

Monumen Rawagede, merupakan bangunan peringatan yang didirikan untuk mengenang Peristiwa Rawagede, terletak tidak jauh dari SMA Negeri 2 Karawang. Monumen ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar sejarah. Oleh karena itu, sangat tepat kalau peneliti mengangkat aspek yang berkaitan dengan Peristiwa Rawagede sebagai materi pelajaran, dan dimasukkan ke dalam silabus pelajaran sejarah di SMA.

Proses pembelajaran sejarah dengan menjadikan Peristiwa Rawagede sebagai materi pembelajaran dapat memberikan peluang kepada para siswa untuk menggali pengetahuan dan memahami peristiwa yang dekat dengan lingkungan para siswa, dan dapat memberikan kesempatan pada para siswa untuk mempelajari berbagai isu kontemporer yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, sehingga pembelajaran sejarah menjadi lebih bermakna, dan memberikan motivasi belajar kepada para siswa serta mengembangkan potensi berpikir kritis.

Pembelajaran yang berbasis isu kontemporer seperti yang dijelaskan di atas, sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan KTSP, karena pembelajaran dipusatkan pada kondisi potensi siswa dan lingkungannya, dan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional dan daerah, pembelajaran sejarah tidak

Ateng Rasihudin, 2012

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Isu Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peristiwa Rawagede

: Penelitian Tindakan Kelas pada Kelas XI IPS-5 di SMA Negeri 2 Karawang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dipenuhi oleh materi-materi pelajaran sejarah nasional saja, tetapi memunculkan materi sejarah lokal yang dekat dengan lingkungan hidup para siswa.

Peristiwa Rawagede yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1947, dapat digunakan sebagai isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap masyarakat di Rawagede, karena tentara Belanda telah membantai masyarakat Rawagede sehingga menyebabkan jatuh korban sebanyak 431 orang tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut di sana telah dibangun Monumen sebagai simbol sejarah yang menggambarkan peristiwa tersebut.

Peristiwa Rawagede dengan implikasinya yang terjadi akhir-akhir ini merupakan salah satu kajian yang menarik untuk dijadikan bahan kajian dalam pembelajaran sejarah dengan mengangkat isu pelanggaran HAM di SMA Negeri 2 Karawang. Melalui kajian isu ini diharapkan dapat membangun kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran sejarah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul:

**MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA
DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH MELALUI KAJIAN ISU HAK
ASASI MANUSIA (HAM) PADA PERISTIWA RAWAGEDE**

B. Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah :

Ateng Rasihudin, 2012

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Isu Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peristiwa Rawagede

: Penelitian Tindakan Kelas pada Kelas XI IPS-5 di SMA Negeri 2 Karawang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- **Bagaimanakah mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran sejarah berbasis isu HAM dalam peristiwa Rawagede ?**

Sedangkan yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

- Apakah penerapan pembelajaran sejarah berbasis isu HAM dalam Peristiwa Rawagede dapat membangun kemampuan berpikir kritis siswa di SMA Negeri 2 Karawang?

C. Verifikasi atau Klarifikasi Konsep

1. Kemampuan berpikir kritis

Berpikir kritis adalah kegiatan berpikir yang meliputi kegiatan menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan dan memecahkannya, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Adapun atribut berpikir kritis di sini sesuai pendapat Harris (Hasan: 2008) meliputi : *analysis, attention, awareness, dan independent judgement.*

Adapun indikator dari analisis adalah :

- kemampuan untuk memecahkan bagian-bagian dari suatu informasi
- melakukan pengelompokan bagian-bagian informasi atau informasi
- menentukan keterkaitan antara satu informasi dengan informasi lain baik dalam hubungan sebab-akibat atau pun dalam hubungan lainnya (korelasi atau kontribusi)
- kemampuan menarik kesimpulan mengenai *basic idea(s)* suatu informasi.

Ateng Rasihudin, 2012

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Isu Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peristiwa Rawagede

: Penelitian Tindakan Kelas pada Kelas XI IPS-5 di SMA Negeri 2 Karawang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Indikator *Attention* atau perhatian :

- memberikan perhatian. Perhatian tersebut harus dikembangkan terhadap materi pelajaran,
- perhatian terhadap fenomena yang ada di sekitar peserta didik, dan fenomena lain yang ada di Indonesia dan dunia.

Indikator *Awareness* atau kesadaran adalah :

- kesadaran dengan kemampuan untuk melihat apa yang terjadi di sekitar seseorang (*the ability to look around*).

Indikator *Independent judgement* :

- kemampuan memberikan pertimbangan atau evaluasi berdasarkan bukti-bukti yang ada dan valid.

Kegiatan berpikir kritis ini dapat diungkapkan siswa dalam bentuk pemberian pertanyaan, menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan dengan memberikan alasan dan argumentasi yang baik.

2. Hak Asasi Manusia (HAM) pada Peristiwa Rawagede

a. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi ini melekat dengan kodrat kita sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata - mata karena ia manusia, bukan karena pemberian

Ateng Rasihudin, 2012

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Isu Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peristiwa Rawagede

: Penelitian Tindakan Kelas pada Kelas XI IPS-5 di SMA Negeri 2 Karawang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

b. Peristiwa Rawagede

Peristiwa Rawagede merupakan peristiwa pembantaian masyarakat sipil (non-militer) di Rawagede khususnya para pria yang berusia 14 tahun keatas oleh tentara Belanda, yang menyerang wilayah Rawagede untuk menangkap para pejuang yang dipimpin oleh Kapten Lukas Kustaryo, dan masyarakat Rawagede terutama laki-laki dibantai karena menolak atau tidak mengetahui keberadaan para pejuang tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 dengan jumlah korban tewas sebanyak 431 orang.

c. Pelanggaran HAM pada Peristiwa Rawagede

Peristiwa Rawagede merupakan peristiwa pembantaian, hal ini teridentifikasi kedalam tindakan kejahatan perang yang merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak-hak hidup manusia, siapapun memiliki hak hidup yang telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Tidak ada seorang pun atau negara mana pun yang yang berhak menghilangkan hak hidup orang atau bangsa lain.

Peristiwa Rawagede merupakan kejahatan perang dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, hal ini sesuai dengan konvensi Jenewa, pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 meletakkan dasar Hukum Humaniter dengan merumuskan bahwa dalam masa konflik bersenjata, maka orang-orang yang dilindungi oleh

Ateng Rasihudin, 2012

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Isu Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peristiwa Rawagede

: Penelitian Tindakan Kelas pada Kelas XI IPS-5 di SMA Negeri 2 Karawang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

konvensi ini harus “ *in all circumstance be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, color, religion or faith, sex, birth, or wealth or other similar criteria.*” disini jelas bahwa semua orang terutama warga sipil harus dilindungi dalam kondisi perang dari berbagai tindakan yang mengancam kehidupan mereka.

Peristiwa Rawagede terjadi pada tahun 1947, sedangkan konvensi Jenewa baru diratifikasi pada tahun 1949, tetapi tindak kejahatan apalagi terhadap warga sipil walaupun dalam masa perang haruslah menjadi pusat perhatian, bukan cuma hak tentara saja yang diperhatikan sebagaimana konvensi-konvensi sebelum tahun 1949. Indikator yang menunjukkan bahwa Peristiwa Rawagede termasuk ke dalam tindakan kejahatan perang dan melanggar hak hidup manusia adalah :

1. Pembunuhan dilakukan bukan terhadap tentara dalam proses terjadinya pertempuran;
2. Yang dibunuh adalah rakyat biasa yang tidak bersenjata;
3. Para korban dalam keadaan tidak berdaya;
4. Para korban tidak melakukan perlawanan;
5. Para korban bukanlah sasaran yang dicari, yaitu para pejuang di bawah pimpinan Lukas Kustaryo, mereka hanya sebagai pelampiasan kemarahan tentara Belanda.

Kejahatan kapanpun terjadi harus mendapatkan tindakan tegas, oleh karena itu para pimpinan Republik kemudian mengadakan peristiwa pembantaian ini kepada *Committee of Good Offices for Indonesia* (Komisi Jasa Baik untuk

Ateng Rasihudin, 2012

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Isu Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peristiwa Rawagede

: Penelitian Tindakan Kelas pada Kelas XI IPS-5 di SMA Negeri 2 Karawang

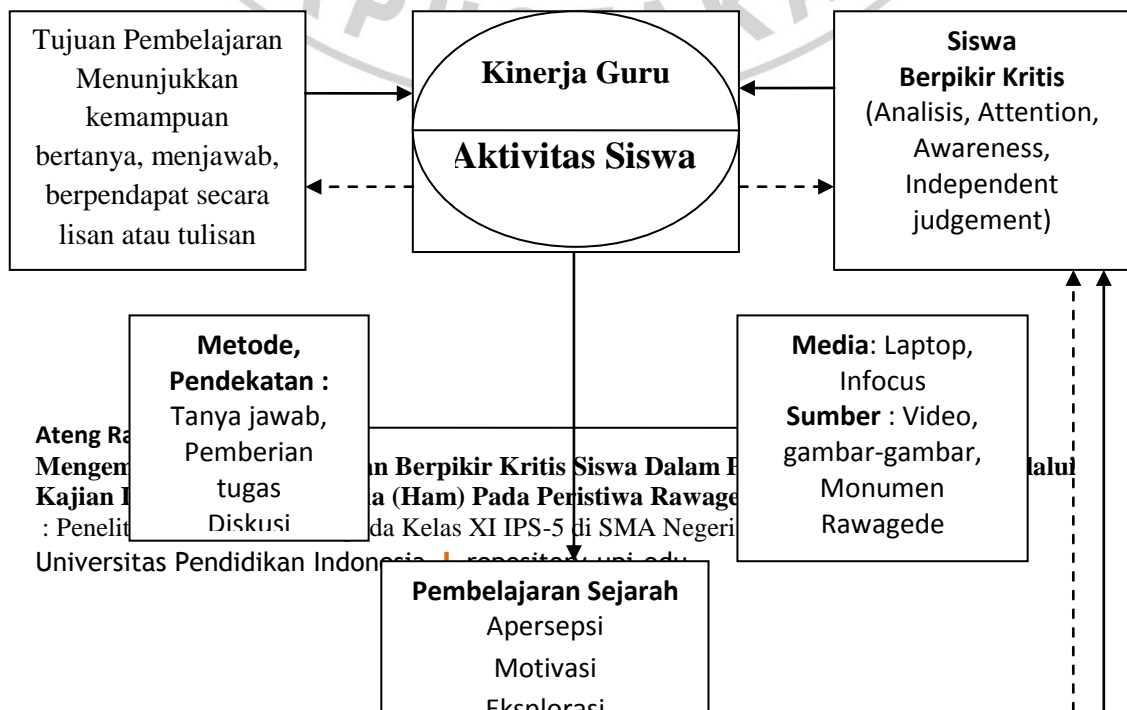
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

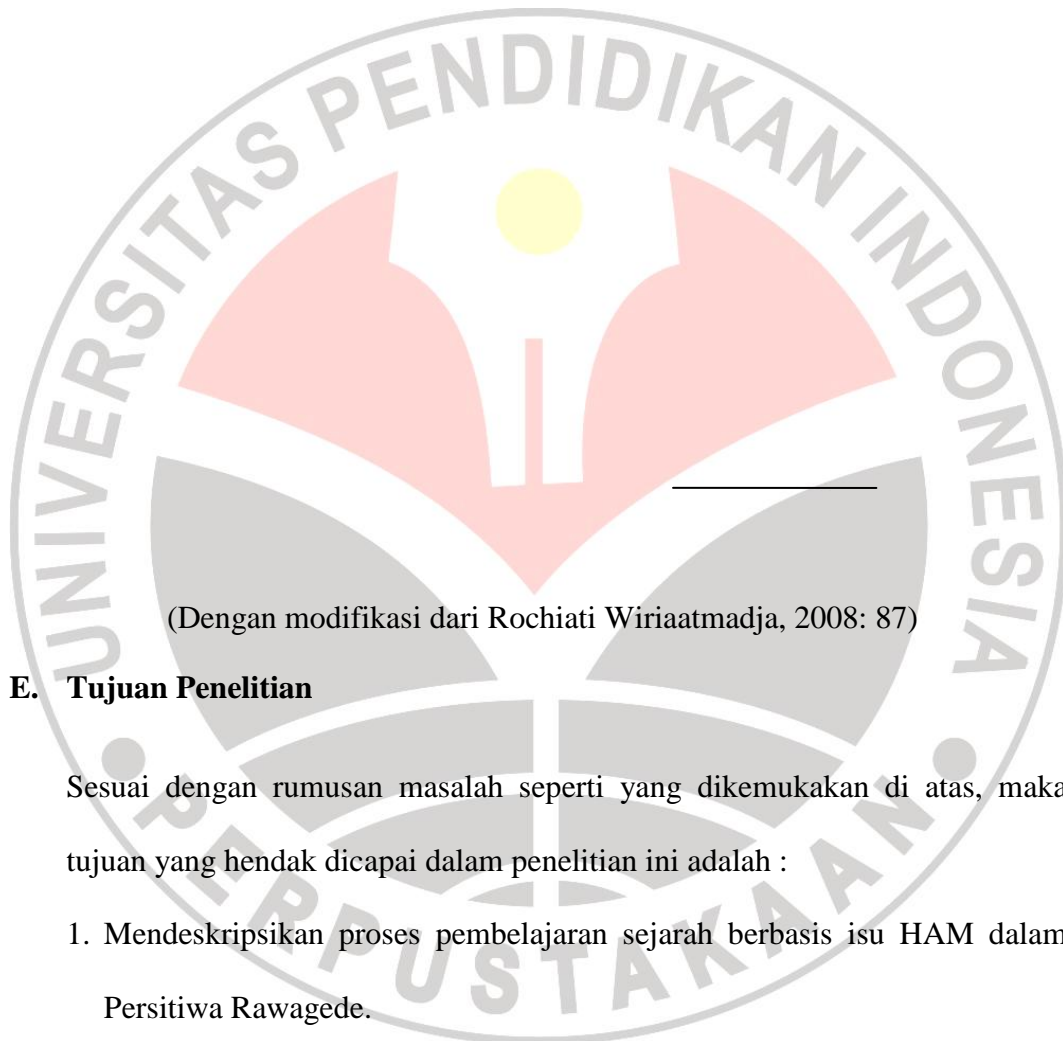
Indonesia) dari PBB. Namun tindakan Komisi ini hanya sebatas pada kritik terhadap aksi militer tersebut yang mereka sebut sebagai “*deliberate and ruthless*”, yang disengaja dan kejam, tanpa ada sanksi yang tegas atas pelanggaran HAM, apalagi untuk memandang pembantaian rakyat yang tak bedosa sebagai kejahatan perang (*war crimes*).

D. Paradigma Penelitian

Bagan 1.1

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH MELALUI KAJIAN ISU HAK ASASI MANUSIA (HAM) PADA PERISTIWA RAWAGEDE





(Dengan modifikasi dari Rochiati Wiriaatmadja, 2008: 87)

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran sejarah berbasis isu HAM dalam Persitiwa Rawagede.
2. Mendeskripsikan penerapan pembelajaran sejarah berbasis isu HAM pada Peristiwa Rawagede dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA Negeri 2 Karawang.

Ateng Rasihudin, 2012

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Isu Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peristiwa Rawagede

: Penelitian Tindakan Kelas pada Kelas XI IPS-5 di SMA Negeri 2 Karawang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. **Bagi siswa**, memberikan motivasi dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dalam proses pembelajaran menjadi sebuah kebiasaan (habit)
2. **Bagi guru**, memberikan pemahaman dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis isu kontemporer dan mampu mengelola proses pembelajaran dengan baik dengan mengoptimalkan potensi siswa dan lingkungan sekolah dan masyarakatnya.
3. **Bagi sekolah**, meningkatkan prestasi sekolah terutama pada mata pelajaran sejarah dan meningkatkan kinerja sekolah melalui peningkatan profesionalisme guru, serta memotivasi para guru lain untuk selalu berinovasi dan meningkatkan pengelolaan proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Ateng Rasihudin, 2012

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Isu Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peristiwa Rawagede

: Penelitian Tindakan Kelas pada Kelas XI IPS-5 di SMA Negeri 2 Karawang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu